

# ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BALI, NTB, DAN NTT TAHUN 2011-2015

Niken Wahyu Wardhani

## Intisari

Di Indonesia, desentralisasi pengelolaan keuangan memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan antarpemda menjadi bervariasi. Bervariasinya kondisi keuangan tersebut menciptakan suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk memiliki sebuah alat agar dapat memantau dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Ritonga dkk., 2012, 2012b). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2011-2015 dengan menggunakan acuan model pengukuran enam dimensi yang dikembangkan Ritonga (2014) yaitu: 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) kemandirian keuangan, dan 6) solvabilitas layanan. Untuk mengakomodir perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2015 berupa basis akrual, maka terdapat satu tambahan dimensi yaitu Solvabilitas Operasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) dari pemerintah daerah di seluruh wilayah Bali, NTB, dan NTT selama 5 tahun (2011-2015). Data yang digunakan sebanyak 196 LHP LKPD yang berasal dari data hasil audit BPK RI dengan opini wajar. Sementara itu, data sebanyak 21 LHP LKPD dari pemerintah daerah yang mendapat opini tidak wajar (TW) dan opini *disclaimer* tidak dipergunakan.

Hasil penelitian berupa pemeringkatan, pengkategorian, dan pendeskripsian atas identifikasi karakteristik pemerintah daerah berperingkat tiga tertinggi dan tiga terendah berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan (IKK). Deskripsi karakteristik dilakukan dengan mengaitkan teori hukum permintaan dan penawaran atas barang jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hasilnya, pada periode tahun 2015, peringkat tertinggi untuk tingkat pemerintah provinsi diraih oleh Provinsi Bali, sedangkan untuk tingkat pemerintah kota diperoleh: 1) Denpasar, 2) Kupang, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten diperoleh: 1) Badung, 2) Sabu Raijua, 3) Sumba Tengah.

**Kata kunci:** Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, Desentralisasi Pengelolaan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD), Solvabilitas Jangka pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, Solvabilitas Operasional

# **ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF THE LOCAL GOVERNMENTS IN BALI, WEST NUSA TENGGARA (NTB), AND EAST NUSA TENGGARA (NTT) IN THE YEAR 2011-2015**

**Niken Wahyu Wardhani**

## **Abstract**

In Indonesia, financial management decentralization has provided the local governments with autonomy to manage their own revenue, expenditures, and financing. This created various financial conditions in each local government. The conditions then require the local government officials to make instruments to monitor and evaluate the capability of the local governments in managing their finance (Ritonga et al., 2012, 2012b). Thus, the purpose of this research is to analyze the financial conditions of the local governments in 2011-2015 using the six dimension models developed by Ritonga (2014), namely 1) short term solvency, 2) long term solvency, 3) budget solvency, 4) financial flexibility, 5) financial independence, and 6) service-level solvency. Then, to accommodate changes in the accounting policy to be an accrual basis in 2015, the operational solvency was added as another dimension.

This research used a qualitative approach with a qualitative descriptive method. Secondary data were collected from the Audit Reports of Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from all local governments in Bali, West Nusa Tenggara (NTB), and East Nusa Tenggara (NTT) for five years (2011-2015). From the audit results conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), it was found that as many as 196 LHP LKPD were granted qualified and unqualified opinions, while 21 LHP LKPD from the local governments were with an adverse opinion. Disclaimer of opinion was not used.

The results of this research were in the form of leveling, categorizing, and describing the characteristics of the three highest levels of the local governments and the three lowest levels of the local government based on the financial condition composite index (FCCI). The description of the characteristics was performed by linking the theory of supply and demand with goods and services provided by the local governments. The results show that in 2015, Bali Province achieved the highest level. As for city governments, the highest levels were occupied by 1) Denpasar and 2) Kupang, and for regency governments, the highest levels were achieved by 1) Badung, 2) Sabu Raijua, and 3) Sumba Tengah.

**Keywords:** local government financial conditions, decentralization of financial management, Audit Reports of Local Governments Financial Statements (LHP LKPD), short term solvency, long term solvency, budget solvency, financial flexibility, financial independence, service-level solvency, operational solvency

## **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Namun, adanya desentralisasi pengelolaan keuangan yang memberikan kebebasan pemda untuk mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan ini mengakibatkan kondisi keuangan antarpemda menjadi bervariasi. Hal tersebut

dikarenakan pemerintah pusat hanya menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan saja, tetapi tidak diikuti dengan pemberian aturan rinci kepada pemda untuk mengelola keuangannya (Ritonga, 2014).

Variasi kondisi keuangan pemda tergantung pada kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sebagaimana diketahui Indonesia memiliki 542 daerah otonom yang terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (Ditjen Otda, 2014) dengan aneka ragam kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu pengalokasian anggaran di setiap daerah akan berbeda satu sama lain menurut program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan masing-masing daerah (Prita, 2016). Terjadinya perbedaan alokasi anggaran tersebut akan menghasilkan kondisi keuangan yang bervariasi antar pemerintah daerah (Ritonga, 2014). Kondisi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk utang maupun pemenuhan pelayanan secara tepat waktu (Wang dkk., 2007). Sedangkan Kloha dkk. (2005) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kondisi yang tidak dapat memenuhi standar dalam operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat beberapa tahun berturut-turut. Dengan kondisi keuangan yang baik maka akan dapat menjamin keberlanjutan pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan berperan penting dalam perekonomian (Ritonga, 2014).

Telah ada beberapa peneliti yang mencoba mengembangkan alat untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah, akan tetapi pengukuran atas kondisi keuangan belum memiliki sistem yang dapat digunakan secara umum. Brown (1993) memperkenalkan 10 indikator pengukuran yang dikenal sebagai "10-point test". Kloha dkk. (2005) mengembangkan metode 10 peringatan dini penyebab *financial distress* di pemerintah daerah. Wang dkk. (2007) menilai kondisi keuangan pemerintah daerah dengan empat

dimensi, yaitu: solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Ritonga dkk. (2012, 2012b, 2014) menggunakan enam dimensi, yang terdiri atas: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2012) dan Natrini (2016) telah melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah menggunakan metode Brown (1993). Analisis indikator yang dibangun oleh DJPK (2012) hanya menekankan pada laporan realisasi anggaran (LRA) yaitu hanya menggambarkan sisi jangka pendek. Oleh karena itu, alat analisis yang digunakan dirasa kurang komprehensif dan belum menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sesungguhnya. Sedangkan penelitian Natrini (2016) di Jawa dan Bali hanya menggunakan data dua tahun yaitu tahun 2013-2014 sehingga penelitian tersebut dirasa kurang komprehensif.

Penelitian lain dilakukan oleh Kusnadhini (2016) yang menganalisis kondisi keuangan di seluruh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 - 2015. Analisis menggunakan model *Financial Trend Monitoring System* (FTMS) yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah di Indonesia.

Ritonga (2014) telah membangun model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan lingkup penelitian se-Jawa untuk tahun anggaran 2007-2010. Model pengukuran Ritonga (2014) dinilai lebih dapat memenuhi kriteria instrumen andal (konsistensi), valid (kejelasan), dan praktis sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh Cooper dan Schindler (2011), dalam Ritonga (2014). Namun demikian, penelitian tersebut baru fokus untuk membangun model, belum melakukan analisis keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk pada pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk

menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT dengan menggunakan model yang lebih komprehensif yaitu model yang dibangun oleh Ritonga (2014).

## LANDASAN TEORITIS

### Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Kondisi keuangan memiliki banyak makna, antara lain: kesehatan keuangan (*financial health*), kesulitan fiskal (*fiscal distress*), risiko keuangan (*financial risk*), krisis fiskal (*fiscal crisis*), dan tekanan fiskal (*fiscal strain*). Berbagai istilah tersebut secara umum memiliki pengertian yang beragam tetapi mengandung makna yang sama, yaitu makna tentang kondisi keuangan (*financial condition*).

Kondisi keuangan didefinisikan dalam konteks kesehatan keuangan, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi utang dan menyediakan layanan pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat ((Hendrick 2004, Zafra-Gómez dkk. 2009). Sedangkan menurut Kloha dkk. (2005) kondisi keuangan didefinisikan dalam konteks kesulitan fiskal, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah tidak dapat memenuhi standar dalam operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat selama beberapa tahun. Kesulitan fiskal juga ditafsirkan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Jones dan Walker, 2007).

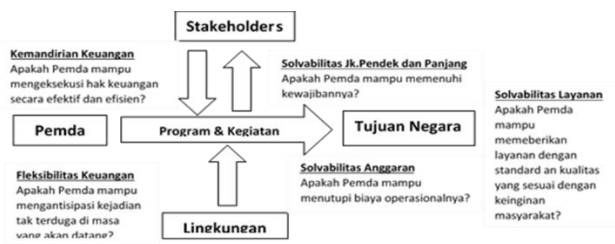
*The Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah diukur dari aspek keberlanjutan, kerentanan, dan fleksibilitas dalam konteks keseluruhan lingkungan ekonomi dan keuangan.

Wang dkk. (2007) mengadopsi definisi yang diajukan oleh Nollenberger dkk. (2003) yaitu sebagai tingkat solvabilitas keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari faktor-faktor solvabilitas kas dan solvabilitas anggaran dalam arti sempit; serta solvabilitas

jangka panjang dan solvabilitas layanan dalam arti luas.

Pada konteks di Indonesia, Ritonga (2012, 2014) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebaiknya diturunkan dari tujuan nasional. Kondisi keuangan pemerintah daerah adalah efek keuangan yang diakibatkan dari hasil kegiatan pemda untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea empat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; mamajukan kesejahteraan rakyat; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu pemerintah harus memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada (sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan sebagainya) serta mampu menerima hak-haknya (mengumpulkan pendapatan) secara efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memenuhi semua kewajibannya (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, kemampuan menutupi operasi, dan kemampuan untuk menyediakan layanan masyarakat dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan, serta mampu mengantisipasi peristiwa yang tak terduga di masa depan).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka definisi kondisi keuangan pemerintah daerah menurut Ritonga (2014) yaitu sebagai kemampuan keuangan suatu pemda untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat), untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Dengan demikian Ritonga (2014) menguraikan kondisi keuangan pemerintah daerah ke dalam enam dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan seperti yang diuraikan ke dalam berikut.



Sumber: Ritonga (2014)

Gambar 2.1 Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah

## Teori Permintaan dan Penawaran

Kondisi pemerintah daerah yang baik identik dengan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat tercermin dalam hukum permintaan dan penawaran, yaitu sesuatu yang diharapkan masyarakat dan yang ditawarkan pemerintah dapat mencapai titik keseimbangan. Penawaran dalam hal ini menyangkut tindakan pemerintah untuk menyediakan, memberikan, memenuhi, melayani, melengkapi dan menyampaikan kewajibannya kepada masyarakat. Sementara itu, permintaan dalam hal ini masyarakat berhak menuntut dan meminta, menyampaikan kebutuhan dan keperluan, serta menagih haknya kepada pemerintah. Hal tersebut selaras dengan teori permintaan dan penawaran dengan campur tangan pemerintah, yang salah satunya dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam Priyono dan Z. Ismail (2016). Dalam teori tersebut diantaranya menyebutkan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi.

Oleh sebab itu, penulis mendeskripsikan kondisi keuangan pemerintah

daerah sesuai karakteristik masing-masing pemda berdasarkan teori permintaan dan penawaran tersebut sebagaimana dinyatakan Ohls dan Wales (1972); Hyman (1990) dalam Ritonga (2014). Penawaran didefinisikan sebagai produk/jasa yang mampu disediakan produsen kepada masyarakat pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Hukum dasar penawaran yaitu apabila nilai komoditas naik, maka produsen menambah jumlah barang/ jasa kepada masyarakat. Sedangkan untuk permintaan, sangat dipengaruhi keadaan dari masyarakat. Adapun karakteristik yang mempengaruhi kondisi keuangan di Indonesia diantaranya yaitu: kemakmuran masyarakat, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, profil umur masyarakat, biaya barang dan jasa, dan efisiensi keuangan (Ritonga, 2014).

## Model Kondisi Keuangan Ritonga (2014)

Ritonga dkk. (2012) dan Ritonga (2014) membangun model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dimulai dari definisi kondisi keuangan. Ritonga dkk. (2012) berpendapat bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan efek keuangan yang diakibatkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks keuangan, kondisi keuangan pemda yang sehat akan terwujud jika pemerintah daerah mampu menjalankan hak-hak keuangannya secara efisien dan efektif serta mampu memenuhi kewajiban keuangan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Kemampuan pemerintah daerah menjalankan hak-hak keuangannya ditunjukkan melalui kemandirian keuangan dalam meningkatkan kemampuan pemda untuk mengumpulkan pendapatan asli daerahnya. Kondisi keuangan juga menunjukkan kemampuan pemda dalam memenuhi kewajiban keuangannya (kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang), kemampuan pemda dalam menutupi operasi berkaitan dengan anggaran, kemampuan pemda dalam menyediakan layanan pada tingkat dan kualitas yang dibutuhkan masyarakat, serta kemampuan pemda dalam mengantisipasi

kejadian tak terduga di masa yang akan datang berupa fleksibilitas keuangan (Ritonga dkk. 2012, dan Ritonga, 2014). Berdasarkan argumen tersebut, maka terdapat enam dimensi dalam mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah, yaitu solvabilitas keuangan jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Oleh karena itu indikator-indikator yang dibangun oleh Ritonga (2014) untuk menganalisis laporan keuangan pemda diarahkan pada kemampuan pemda dalam mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan rakyat.

Model dari Ritonga (2014) membangun hasil akhir berupa indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah, sehingga mudah dipahami. Dalam mengembangkan model, Ritonga (2014) melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa dengan berdasarkan pengelompokan tipe pemerintah daerah, yaitu pemda kabupaten dan pemda kota. Pengelompokan pemda ke dalam kelompok yang setara akan meningkatkan kualitas indeks komposit yang dibuat. Namun model ini baru fokus dalam mengembangkan model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah, belum melakukan analisis secara menyeluruh pada pemerintah daerah di Indonesia.

Kekuatan dari penelitian Ritonga (2014) yaitu telah membangun model sesuai dengan kriteria sebagai *instrument* yang baik dalam mengukur kondisi keuangan pemda sebagaimana yang dinyatakan oleh Cooper dan Schindler (2011) dalam Ritonga (2014) seperti:

- 1) andal (telah menguji keandalan indikator-indikator penyusun suatu dimensi dan semua indikator pembentuk indeks komposit kondisi keuangan pemda);
- 2) valid (telah mengkonsepkan definisi kondisi keuangan pemda sebelum menentukan indikator untuk mengukur kondisi keuangan, telah menguji hubungan dengan faktor-faktor yang berkaitan, dan

telah menguji kemampuan untuk membedakan); serta

- 3) praktis (adanya indeks komposit keuangan, menggunakan data publik yang tersedia, dan menggunakan data yang diterbitkan secara periodik).

Data publik sebagai sumber data untuk menghitung enam dimensi keuangan diperoleh dari data LKPD yang telah diaudit BPK. Dalam penelitian ini, untuk menyesuaikan perkembangan basis sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual (mulai tahun anggaran 2015), maka perlu ada penyesuaian tambahan formula dalam rasio berkaitan dengan sumber data LKPD dari laporan operasional (LO). Dengan demikian, kemampuan pemda untuk menutupi kewajiban operasional tahun 2015 dapat ditunjukkan melalui dimensi solvabilitas operasional, selain dari dimensi solvabilitas anggaran (Ritonga, 2017).

Berikut penjelasan dari masing-masing dimensi pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah model Ritonga (2014):

### 2.3.5.1 Solvabilitas Jangka Pendek

adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan (Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut:

- Rasio A = 
$$\frac{(\text{Kas dan setara kas} + \text{Inv. jangka pendek})}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$$
- Rasio B = 
$$\frac{(\text{Kas} + \text{Inv jangka pendek} + \text{Piutang})}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$$
- Rasio C = 
$$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$$

Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut maka semakin banyak pula aktiva lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar sebuah pemerintah daerah. Namun, nilai rasio yang terlalu tinggi dapat

mengindikasikan bahwa suatu pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang berlebihan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal (Ritonga, 2014).

**2.3.5.2. Solvabilitas Jangka Panjang** adalah kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban keuangan jangka panjangnya (Nollenberger dkk. 2003, CICA 1997 dalam Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut.

- Rasio A =  $\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$
- Rasio B =  $\frac{\text{Total aset}}{\text{Total kewajiban}}$
- Rasio C =  $\frac{\text{Ekuitas Dana}}{\text{Total kewajiban}}$

Dimensi tersebut menunjukkan tingkat keberlanjutan pemerintah daerah. Kewajiban jangka panjang hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah jika mereka memiliki aset yang cukup yang didanai dari sumber daya sendiri (Ritonga, 2014). Semakin besar nilai ketiga rasio tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin banyak aset yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka panjang pemda.

**Solvabilitas Anggaran dan Solvabilitas Operasional.** Solvabilitas anggaran (basis kas) dan solvabilitas operasional (basis akrual) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam mendanai operasinya selama satu perioda anggaran keuangan (Nollenberger dkk. 2013). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut.

Solvabilitas Anggaran:

- Rasio A =  $\frac{(\text{Total pendt.LRA}-\text{Pendt DAK LRA})}{(\text{Total belanja} - \text{Belanja modal})}$
- Rasio B =  $\frac{(\text{Total pendptLRA} - \text{Pendpt DAK LRA})}{\text{Belanja operasional}}$

- Rasio C =  $\frac{(\text{Total pendpt LRA} - \text{Pendpt DAK LRA})}{\text{Belanja pegawai}}$

- Rasio D =  $\frac{\text{Total pendpt LRA}}{\text{Total belanja}}$

Solvabilitas Operasional:

- Rasio A =  $\frac{(\text{Total pendt.LO}-\text{Pendt DAK LO})}{(\text{Total belanja} - \text{Belanja modal})}$

- Rasio B =  $\frac{(\text{Total pendptLO} - \text{Pendpt DAK LO})}{\text{Belanja operasional}}$

- Rasio C =  $\frac{(\text{Total pendpt LO} - \text{Pendpt DAK LO})}{\text{Belanja pegawai}}$

- Rasio D =  $\frac{\text{Total pendpt LO}}{\text{Total belanja}}$

Pengurangan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari total pendapatan disebabkan karena pendapatan DAK bukan merupakan pendapatan yang bersifat rutin dan berada di luar kendali pemerintah daerah. Pada rasio A, belanja modal dikurangkan dari total belanja karena belanja modal bukan merupakan bagian dari kegiatan operasional. Sedangkan pada rasio C, penempatan belanja pegawai sebagai penyebut karena belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam postur belanja operasional pemda.

Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja operasionalnya. Hal ini menunjukkan kondisi solvabilitas anggaran yang membaik.

**Kemandirian keuangan.** Kemandirian Keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien serta tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber nasional maupun internasional (CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014). Indikator tingkat kemandirian ditentukan berdasar rasio sebagai berikut.

- Rasio A =  $\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Pendapatan LRA}}$
- Rasio B =  $\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}}{\text{Total Belanja}}$
- Rasio C =  $\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LO}}{\text{Total Pendapatan LO}}$
- Rasio D =  $\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah LO}}{\text{Total Beban}}$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel yang penting dalam pembiayaan daerah. PAD yang tinggi akan mampu mendukung kapasitas pembangunan sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar rasio PAD terhadap pendapatan dana atau belanja menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan pemda terhadap sumber pendanaan pusat/provinsi (Ritonga, 2014). Dengan demikian, semakin besar nilai dari keempat rasio, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah.

**Fleksibilitas keuangan.** Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi di mana pemda dapat meningkatkan sumber daya keuangannya, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014). Kondisi ini menunjukkan kemampuan pemda untuk menutupi beban utang (Case & Phillips, 2004 dalam Ritonga, 2014). Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio berikut.

- Rasio A =  $\frac{(\text{Total pendpt LRA} - \text{Pendpt DAK LRA} - \text{Belanja peg})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja pegawai})}$
- Rasio B =  $\frac{(\text{Total pendpt LRA} - \text{Pendpt DAK LRA})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja pegawai})}$
- Rasio C =  $\frac{(\text{Total pendpt LO} - \text{Pendpt DAK LO} - \text{Beban peg})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Beban pegawai LO})}$
- Rasio D =  $\frac{(\text{Total pendpt LO} - \text{Pendpt DAK LO})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Beban pegawai LO})}$

Pembilang diwakili oleh kapasitas pendapatan pemda setelah dikurangi belanja-belanja wajib dan/ atau pendapatan-pendapatan terikat. Di sisi lain, penyebut diwakili oleh jumlah

kewajiban pemda kepada pihak lain. Oleh karena itu, dimensi fleksibilitas diukur dengan rasio kapasitas utang. Semakin tinggi nilai keempat rasio maka semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luar biasa baik dari internal maupun eksternal organisasi pemda (Ritonga, 2014).

**Solvabilitas layanan.** Solvabilitas layanan enunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat (Wang dkk. 2007 dalam Ritonga, 2014). Untuk memenuhi definisi tersebut, maka penyebut untuk rasio-rasio dalam dimensi ini adalah jumlah orang yang dilayani oleh pemerintah daerah. Sedangkan pembilang untuk rasio-rasio ini adalah sumber daya fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh pemda dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Indikator kemampuan ini ditentukan berdasar rasio sebagai berikut.

- Rasio A =  $\frac{\text{Total ekuitas}}{\text{Jumlah penduduk}}$
- Rasio B =  $\frac{\text{Total aset}}{\text{Jumlah penduduk}}$
- Rasio C =  $\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Jumlah penduduk}}$
- Rasio D =  $\frac{\text{Total belanja LRA}}{\text{Jumlah penduduk}}$
- Rasio E =  $\frac{\text{Total belanja Modal LRA}}{\text{Jumlah penduduk}}$
- Rasio F =  $\frac{\text{Total beban LO}}{\text{Jumlah penduduk}}$

Rasio ini menunjukkan seberapa besar biaya pemerintah daerah yang diperlukan untuk melayani setiap warga. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik solvabilitas layanan pemerintah daerah karena semakin banyak layanan (baik kuantitas atau kualitas) yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN



## Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT tahun 2011-2015. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Creswell (2014), bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Hennink (2011) mengemukakan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk meneliti pengalaman sekelompok orang menggunakan seperangkat metoda spesifik. Penelitian ini menggunakan metoda pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dengan melakukan penghitungan indeks kondisi/kesehatan keuangan pemerintah daerah yang dikonsepsi Ritonga (2014). Penelitian deskriptif tidak untuk menguji hipotesis dan membuat prediksi. Tujuan penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi (Soewadji, 2012).

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik dokumentasi yaitu menggunakan dokumen data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen publik yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas seluruh LKPD di Bali, NTB, selama kurun waktu tahun anggaran 2011-2015. Penelitian ini hanya terbatas pada data LKPD dengan hasil audit BPK RI beropini wajar (WTP dan WDP) sehingga laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan kewajarannya (opini tidak wajar dan TMP) tidak dimasukkan ke dalam analisis data.
- b. Data publikasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) regional Bali, NTB, dan

NTT; misalnya data jumlah penduduk dan PDRB atas dasar harga berlaku masing-masing daerah.

## Analisis data

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi data dari laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan alat ukur yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), yaitu dengan menggunakan enam dimensi pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah di kawasan Bali, NTB, dan NTT dalam kurun waktu lima tahun anggaran 2011-2015. Tahun 2015 terdapat satu tambahan dimensi solvabilitas operasional untuk mengakomodir kebijakan akuntansi berbasis akrual. Berikut langkah-langkah sesuai model pengukuran Ritonga (2014):

**Tahap menentukan kelompok acuan (*benchmark*) pemerintah daerah yang setara.** Kelompok acuan dalam analisis ini menggunakan pengelompokan yang paling sederhana yaitu berdasarkan tipe pemerintah daerah berupa kelompok dengan skala pemda provinsi, pemda kabupaten, dan pemda kota.

## Tahap Menghitung Rasio Dimensi, Indeks Indikator, dan Indeks Dimensi.

- a) Menghitung dan Menganalisis Rasio Masing-masing Dimensi
- b) Menghitung Indeks Indikator/ Indeks Rasio  $X_i$  ( $IRX_i$ )

$$IRX_i = \frac{(\text{Nilai } X \text{ aktual}_n - \text{Nilai } X \text{ terendah})}{(\text{Nilai } X \text{ tertinggi} - \text{Nilai } X \text{ terendah})}$$

adapun  $X$  = rasio yang membentuk dimensi

- c) Menghitung Indeks Dimensi ( $ID_i$ )

$$ID_i = \frac{(\sum IRX_i)}{n}$$

adapun  $IRX$  = indeks rasio;  $n$  = jumlah rasio yang membentuk dimensi

**Tahap menghitung indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah.** Tahun 2011-2014 menggunakan rumus sesuai model Ritonga (2014) sebagai berikut:  $IKK = \sum(W_i \times ID_i)$ ;  $0 \leq IKK \leq 1$

IKK = indeks kondisi keuangan;  $W_i$  = bobot masing-masing dimensi; ID = indeks dimensi

Adapun bobot untuk masing-masing indeks dimensi sebagai berikut :

| Dimensi                     | Bobot |
|-----------------------------|-------|
| Solvabilitas Jangka Pendek  | 0,206 |
| Solvabilitas Anggaran       | 0,142 |
| Solvabilitas Jangka Panjang | 0,245 |
| Solvabilitas Layanan        | 0,107 |
| Fleksibilitas Keuangan      | 0,175 |
| Kemandirian Keuangan        | 0,125 |
| Total bobot                 | 1,000 |

Sumber: Ritonga, 2014

Sedangkan rumus indeks komposit kondisi keuangan pemda tahun 2015 menggunakan rumus:  $IKK = \sum(ID_i/n)$ ;  $n$  = jumlah indeks dimensi;  $0 \leq IKK \leq 1$

**Tahap Pemingkatan dan Pengkategorian Kondisi Keuangan.** Setelah nilai indeks masing-masing pemerintah daerah diketahui, akan dilakukan pemingkatan. Selanjutnya, hasil dari pemingkatan kondisi keuangan akan dilakukan pengkategorian ke dalam tiga kategori, yaitu kategori “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik wilayah distribusi normal. Pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai “kondisi keuangan yang baik” jika indeks kondisi keuangan (IKK) mempunyai nilai lebih besar dari  $mean + (1 \times \text{standar deviasi})$ . Pemda dengan “kondisi keuangan yang cukup sehat” jika memiliki nilai IKK antara  $mean + (1 \times \text{standar deviasi})$  dan  $mean - (1 \times \text{standar deviasi})$ . Dan pemda dengan “kondisi keuangan yang kurang sehat” jika memiliki nilai IKK kurang dari  $mean - (1 \times \text{standar deviasi})$ .

**Deskripsi Karakteristik Kondisi Keuangan Pemda.** Deskripsi akan dilakukan pada tiga pemerintah daerah dengan indeks komposit kondisi keuangan terbaik dan tiga pemerintah daerah dengan indeks komposit kondisi

keuangan terburuk tahun 2015. Dalam mendeskripsikan kondisi keuangan, penulis akan menginterpretasikan data dengan mengkaitkan antara data hasil indeks kondisi keuangan dan teori permintaan penawaran yang dapat berlaku pada masing-masing pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondisi keuangan menurut Ritonga (2014) dari sudut pandang hukum penawaran dan permintaan, yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) profil umur masyarakat, (3) kemakmuran masyarakat, (4) kepadatan penduduk, (5) efisiensi keuangan, serta (7) biaya barang dan jasa.

### Validitas Data

Validitas data digunakan peneliti untuk menguji keakuratan hasil penelitian dengan menggunakan metode sebagaimana dinyatakan oleh Creswell (2014) yaitu antara lain dengan *peer debriefing*. Di samping itu untuk menguji keakuratan data dilakukan melalui *footing* dan *cross footing*. Jika terdapat penjumlahan angka-angka di LHP tidak sama, maka data angka tetap menggunakan data sesuai sumber data tahun yang bersangkutan (*on face* LHP LKPD).

## ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Indikator Kondisi Keuangan

#### a. Solvabilitas jangka pendek

Rasio solvabilitas jangka pendek baik pemda provinsi, pemda kota, maupun pemda kabupaten di Bali, NTB, dan NTT dari tahun 2011-2015 menunjukkan tren menurun. Meskipun pada tahun 2012 untuk level pemda kota sempat naik tajam, demikian juga pada level kabupaten sempat naik pada tahun 2014. Peningkatan nilai rasio pada tahun 2012 pada level pemda provinsi dan pemda kota, serta tahun 2014 pada level kabupaten mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah aktiva lancar yang menganggur (lampiran 15). Sementara itu, pemda perlu mengoptimalkan aktiva lancarnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, penurunan tren menunjukkan sinyal yang

baik bagi kondisi keuangan pemda karena menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan aktiva lancar, yang artinya mengurangi aktiva lancar yang berlebihan dengan mengoptimalkan aktiva lancarnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian aktiva lancar tidak menganggur dalam jumlah yang besar. Namun, pemda juga perlu berhati-hati agar nilai ini tidak mencapai angka minus, sehingga mereka masih dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Hasil analisis tahun 2015 menunjukkan bahwa Pemprov Bali, Pemkot Kupang, dan Pemkab Sabu Raijua memiliki nilai rasio terbesar dalam Solvabilitas Jangka Pendek pada masing-masing level. Sementara itu Pemprov NTB, Pemkot Mataram, dan Pemkab Lombok Timur adalah pemda yang paling lemah dibandingkan dengan pemda dalam level yang sejenis. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

#### **b. Solvabilitas jangka panjang**

Berdasarkan tabel tren median pada level pemda provinsi dan pemda kabupaten, tren Rasio A menunjukkan tren yang meningkat sepanjang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, yaitu dari 3.404,69 miliar menjadi 5.404,696 miliar. Kondisi ini mencerminkan bahwa dalam rentang tersebut, solvabilitas jangka panjang pemerintah kota dari kepemilikan aset tetap menguat. Hal ini berbeda dengan level pemda kota, tren median Rasio A tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung menurun, yaitu dari 1.436,889 miliar menjadi 1.430,358 miliar. Sementara itu pada tahun 2015, Rasio A pada ketiga level pemda mengalami tren menurun. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan akuntansi tahun 2015 yaitu berlakunya standar akuntansi berbasis akrual, salah satunya adanya penyusutan aset sehingga solvabilitas jangka panjang menjadi turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Tahun 2015 solvabilitas jangka panjang pada semua level pemda dari kepemilikan aset tetap melemah.

Tren Rasio B dan Rasio C menunjukkan tren yang hampir sama dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada level pemda provinsi menunjukkan tren yang fluktuatif. Sedangkan pada level pemda kota dan pemda kabupaten menunjukkan tren yang menurun.

Namun, secara keseluruhan rasio A, B, dan C tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan Pemda di Bali, NTB, dan NTT cukup baik karena masih mampu memenuhi total kewajibannya berdasarkan dari besaran kepemilikan aset.

Hasil analisis tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai tertinggi Rasio A, B, dan C untuk level pemda provinsi yaitu Pemprov NTB. Pada level pemda kota, nilai tertinggi Rasio A yaitu Pemkot Denpasar, sementara itu nilai tertinggi untuk rasio B dan C yaitu Pemkot Kupang. Pada level pemda kabupaten, Pemkab Badung memiliki nilai Rasio A paling tinggi. Sementara itu nilai tertinggi untuk rasio B dan C yaitu Pemkab Sabu Raijua. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

#### **c. Solvabilitas anggaran**

Rasio solvabilitas anggaran pada level pemda provinsi menunjukkan tren median yang cenderung menurun dari tahun 2014 ke tahun 2015 untuk Rasio A, B, dan D. Sedangkan pada Rasio C terjadi peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pada level pemda kota menunjukkan tren median yang cenderung meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 untuk Rasio B dan C. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kota untuk menutupi belanja operasional dan belanja pegawai mereka semakin baik. Sedangkan pada Rasio A dan D cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran pemerintah kota dari sisi pendapatan, melemah. Bahkan pada Rasio D menunjukkan nilai rasio di bawah 1,000 yang menggambarkan total pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan total belanja. Hal ini perlu diwaspadai karena pemerintah daerah belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menutupi belanja mereka. Pada level pemda kabupaten memiliki tren

median yang sama dengan pemda kota, yaitu terjadi peningkatan pada rasio B dan C serta terjadi penurunan pada rasio A dan D dari tahun 2014 ke tahun 2015. Kondisi menurun menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran pada tahun tersebut cenderung kurang sehat. Kecenderungan menurun rasio-rasio tersebut menjadi peringatan dini bagi pemda terkait kemampuannya dalam membiayai kegiatan operasional.

Pemerintah daerah dengan nilai rasio tertinggi pada tahun 2015 untuk skala pemerintah provinsi adalah Provinsi Bali pada Rasio B dan C. Sedangkan Nilai Rasio A dan D tertinggi adalah Pemprov NTB. Untuk skala pemerintah kota yang mendapat nilai tertinggi Rasio A adalah Kota Mataram, Rasio B dan C adalah Kota Denpasar, Rasio D adalah Kota Kupang. Skala pemerintah kabupaten yang mendapat nilai tertinggi keempat rasio adalah Kabupaten Badung. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

#### **d. Solvabilitas Operasional**

Solvabilitas Operasional pada level pemda provinsi, hasil perhitungan rasio solvabilitas operasional dengan nilai tertinggi untuk rasio A, B, dan D yaitu: Pemprov NTB; rasio C pemprov Bali. Pada level pemda kota, nilai tertinggi rasio A dan B yaitu Pemkot Bima, untuk rasio C Pemkot Denpasar, sedangkan rasio D Pemkot Bima. Pada level pemda kabupaten, nilai tertinggi rasio A, B, dan C yaitu Pemkab Badung, sedangkan rasio D Pemkab Sabu Raijua. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

#### **e. Fleksibilitas Keuangan**

Nilai median setiap rasio per level pemda dari tahun 2011-2015. Rasio A dan B fleksibilitas keuangan pada pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi di Bali, NTB, dan NTT dari tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan tren. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas keuangan pemda yang semakin baik dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang. Namun demikian, pada level pemda kota dan pemda kabupaten perlu berhati-hati karena pada rasio A maupun rasio C

menunjukkan nilai di bawah 1,000. Hal tersebut berarti total pendapatan setelah dikurangi DAK dan belanja pegawai belum cukup untuk menutupi total kewajiban ditambah belanja pegawai sehingga mengindikasikan bahwa sebagian besar pemkot dan pemkab memiliki fleksibilitas keuangan yang kurang memadai. Pemerintah daerah tidak mampu menghadapi dengan baik jika terjadi peristiwa luar biasa baik dari internal atau eksternal organisasi pemda.

Nilai fleksibilitas keuangan yang paling baik pada level pemda provinsi yaitu Pemprov Bali untuk Rasio A dan B, sedangkan untuk Rasio C dan D yaitu Pemprov NTT. Nilai tertinggi pada keempat rasio pada level pemda kota yaitu Pemkot Denpasar, sedangkan nilai terendah yaitu Pemkot Bima. Sementara itu pada level pemda kabupaten, nilai tertinggi untuk Rasio A, B, dan C yaitu Pemkab Badung, sedangkan nilai tertinggi untuk rasio D yaitu Pemkab Sabu Raijua. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 4.

#### **f. Solvabilitas Layanan**

Pada level pemda provinsi dari tahun 2011-2014, Rasio A, B, dan D mengalami tren yang meningkat. Sedangkan untuk Rasio C dan E pada tahun 2014 menunjukkan tren yang menurun dari tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2015 juga mengalami penurunan untuk Rasio A, B, C, dan E.

Pada level pemda kota, keseluruhan rasio menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2011-2014. Meskipun sempat menurun di tahun 2012 pada Rasio E. Sementara itu pada tahun 2015 juga mengalami penurunan untuk Rasio A, B, C, dan E.

Pada level pemda kabupaten, keseluruhan rasio mengalami tren yang meningkat pada tahun 2011-2014. Sedangkan tahun 2015, Rasio A, B, C, D, dan E mengalami penurunan. Penurunan nilai rasio baik pada level provinsi, kota, maupun kabupaten di tahun 2015 tersebut disebabkan karena adanya kebijakan akumulasi penyusutan pada aset.

Hasil analisis tahun 2015 Pemprov NTB tertinggi untuk Rasio A, B, C, dan E. Sedangkan Pemprov Bali tertinggi untuk Rasio D dan F. Pada level pemda kota, Pemkot Bima memiliki nilai solvabilitas layanan yang paling baik. Sementara itu, Pemkot Denpasar merupakan pemda yang paling kecil dalam rasio solvabilitas layanan. Pada level pemda kabupaten, Pemkab Badung memiliki rasio A, B, dan C yang paling baik. Berdasarkan hasil analisis, Pemkab Badung memiliki nilai ekuitas dan aset tetap paling besar yaitu masing-masing sebesar Rp42.266.506,44 dan Rp37.572.203,75 untuk melayani setiap warganya. Beda halnya dengan Pemkab Sumba Tengah memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dari sisi belanja dengan nilai pada Rasio D yang paling tinggi dibandingkan pemkab yang lain. Pemkab Sumba Tengah melakukan pengeluaran belanja Rp7.059.590,76 untuk melayani setiap warganya. Sementara itu Pemkab Lombok Timur memiliki nilai Rasio A, B, C, D, dan F yang paling rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komitmen pemda dalam melayani setiap warganya masih rendah. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 5.

#### **g. Kemandirian Keuangan**

Tren median rasio kemandirian keuangan level pemda kota dan pemda kabupaten mengalami tren yang meningkat, meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2015 untuk level pemda kabupaten. Peningkatan tren tersebut mengindikasikan kemandirian keuangan semakin membaik, artinya pemda kota dan pemda kabupaten semakin tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya. Berbeda dengan pemda kota dan pemda kabupaten, tren kemandirian keuangan pemda provinsi justru menunjukkan tren yang menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan pemerintah provinsi semakin berkurang. Dengan menurunnya angka rasio mengindikasikan ketergantungan pemda provinsi atas pembiayaan dari pemerintah pusat semakin meningkat.

Hasil analisis tahun 2015, tingkat kemandirian keuangan Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung, merupakan pemda yang paling baik dalam kemandirian keuangan dibandingkan dengan pemda lain yang sejenis. Sebagai contoh, masing-masing rasio A, B, C, dan D pada Pemkab Badung adalah 80,4%, 87,1%, 80,6%, dan 101,1%. Kondisi ini berarti bahwa sekitar 80,40% dari pendapatan pemda merupakan pendapatan di bawah kendali pemda tersebut. Adapun rincian adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 7. Namun, secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan di wilayah Bali, NTB, dan NTT masih lemah dan perlu dioptimalkan mengingat rata-rata perolehan PAD terhadap total pendapatan selama tahun 2011-2015 hanya berkisar 22,71%

#### **Pemeringkatan dan Pengkategorian Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah**

Setelah diketahui rasio pada masing-masing dimensi, langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks rasio dan indeks dimensi, serta indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah. Adapun perhitungan indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah untuk masing-masing level pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT tahun 2011 – 2015 sebagaimana terdapat pada Lampiran 7-9.

##### **a. Skala pemerintah provinsi**

Pemeringkatan kondisi keuangan pada level pemda provinsi, pemprov Bali selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2011-2013 dan tahun 2015 konsisten menduduki peringkat pertama. Sedangkan Pemprov NTB konsisten pada posisi terendah selama lima tahun berturut-turut.

Dari hasil pengkategorian untuk tahun 2015, Provinsi Bali menunjukkan kondisi keuangan yang “Baik”. Sedangkan Pemprov NTB dan Pemprov NTT menunjukkan kondisi keuangan yang “Cukup baik”.

##### **b. Skala pemerintah kota**

Pada level pemda kota, Pemkot Denpasar mengalami peningkatan kondisi keuangan,

yaitu mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 konsisten menempati peringkat pertama. Sedangkan Pemkot Mataram tetap dalam posisi terendah dalam tahun 2011-2015.

Dari hasil penilaian untuk tahun 2015, Pemkot Denpasar, Pemkot Kupang, dan Pemkot Bima sebagai tiga peringkat tertinggi menunjukkan kondisi keuangan yang “Cukup”. Pemkot Denpasar mengalami penurunan, dari kategori “Baik” di tahun 2014 menjadi kategori “Cukup” di tahun 2015. Pemkot Kupang konsisten dalam kategori cukup selama lima tahun berturut-turut. Pemkot Mataram menunjukkan kondisi keuangan yang “Kurang baik”.

### c. Skala pemerintah kabupaten

Pada level pemda kabupaten, Pemkab Badung; Pemkab Sabu Raijua; dan Pemkab Sumba Tengah konsisten dalam tiga peringkat terbaik selama tahun 2011-2015 (Lampiran 11).

Dari hasil penilaian untuk tahun 2015, Pemkab Badung, Pemkab Sabu Raijua dan Pemkab Sumba Tengah sebagai tiga peringkat tertinggi menunjukkan kondisi keuangan yang “Baik”. Sedangkan pemda kabupaten yang lain menunjukkan kondisi keuangan yang “Cukup sehat”. Tidak ada pemda kabupaten yang menunjukkan kondisi keuangan “kurang baik”.

### Analisis Karakteristik Kondisi Keuangan

Analisis karakteristik yang mempengaruhi kondisi keuangan pemda terhadap terhadap hukum permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam hal ini difokuskan bagi tiga pemda kabupaten dengan peringkat kondisi keuangan tertinggi dan tiga pemerintah daerah kabupaten terendah. Skala pemda provinsi dan pemda kota tidak dianalisis karena tidak bisa diperbandingkan. Adapun Tabel Tiga Pemda Berperingkat Tertinggi dan Terendah di Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015 untuk Indeks Kondisi Keuangan (IKK) sebagai berikut.

| Pemda Tiga Tertinggi  | IKK 2015 | Pemda Tiga Terendah   | IKK 2015 |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| <b>Level Provinsi</b> |          | <b>Level Provinsi</b> |          |
| Provinsi Bali         |          | Provinsi Nusa         |          |

| Pemda Tiga Tertinggi   | IKK 2015 | Pemda Tiga Terendah          | IKK 2015 |
|------------------------|----------|------------------------------|----------|
|                        | 0,696    | Tenggara Barat               | 0,559    |
|                        |          | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 0,476    |
| <b>Level Kota</b>      |          | <b>Level Kota</b>            |          |
| Kota Denpasar          | 0,597    | Kota Bima                    | 0,445    |
| Kota Kupang            | 0,491    | Kota Mataram                 | 0,229    |
| <b>Level Kabupaten</b> |          | <b>Level Kabupaten</b>       |          |
| Kabupaten Badung       | 0,722    | Kabupaten Flores Timur       | 0,100    |
| Kabupaten Sabu Raijua  | 0,619    | Kabupaten Belu               | 0,098    |
| Kabupaten Sumba Tengah | 0,374    | Kabupaten Bangli             | 0,096    |

### a. Karakteristik jumlah penduduk

Jumlah penduduk menciptakan permintaan akan barang dan jasa yang harus disediakan oleh pemda. Semakin meningkat jumlah penduduk maka permintaan jumlah barang dan jasa akan meningkat juga (Nollenberger dkk., 2003). Artinya pemda perlu meningkatkan jumlah belanjanya, seperti penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas pendidikan yang lebih banyak. Kondisi ini akan memperburuk kondisi keuangan pemda melalui sisi pengeluaran. Namun di sisi lain, Nollenberger dkk, 2003 dalam Ritonga (2014) juga menyatakan bahwa populasi akan menyediakan sumber daya bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya populasi, maka basis pendapatan pemerintah daerah akan meningkat. Situasi ini akan mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan. Pernyataan yang kedua ini selaras dengan hasil identifikasi jumlah penduduk dalam penelitian ini. Pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi cenderung memiliki rata-rata jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan rata-rata jumlah penduduk pemerintah daerah dengan peringkat terendah. Sebagaimana tabel berikut.

| Tiga Pemkab dengan IKK Tertinggi | Jumlah Penduduk Th.2015 | Tiga Pemkab dengan IKK Terendah | Jumlah Penduduk Th.2015 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Badung                           | 616.400                 | Flores Timur                    | 246.994                 |
| Sabu Raijua                      | 85.970                  | Belu                            | 206.778                 |
| Sumba Tengah                     | 68.515                  | Bangli                          | 222.600                 |
| <b>Rata-rata</b>                 |                         | <b>Rata-rata</b>                |                         |

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
|  | 256.962 |  | 225.457 |
|--|---------|--|---------|

Sumber: BPS Provinsi Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015

### b. Karakteristik kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui biaya penyediaan barang dan jasa (Nollenberger dkk., 2003 dalam Ritonga, 2014). Jika suatu pemda dengan jumlah penduduk yang tersebar di wilayah dengan luas yang lebih besar, maka biaya penyediaan barang dan jasa akan lebih tinggi untuk setiap penduduknya, misalnya penyediaan layanan berupa sekolah, pusat kesehatan, pemeliharaan jalan dan jembatan akan lebih murah untuk setiap penduduknya. Hal ini sesuai dengan hasil identifikasi perbandingan rata-rata kepadatan penduduk pada tiga pemda berperingkat tertinggi dengan tiga pemda berperingkat terendah berikut ini.

| Tiga Pemkab dengan IKK Tertinggi | Kepadatan Penduduk Th.2015 (jiwa/km <sup>2</sup> ) | Tiga Pemkab dengan IKK Terendah | Kepadatan Penduduk Th.2015 (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Badung                           | 1.473  | Flores Timur                    | 141  |
| Sabu Raijua                      | 187  | Belu                            | 166  |
| Sumba Tengah                     | 38   | Bangli                          | 427  |
| Rata-rata                        | 566  | Rata-rata                       | 245  |

Sumber: BPS Provinsi Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015

### c. Karakteristik Kemakmuran Masyarakat

Perubahan tingkat kemakmuran masyarakat dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan barang dan jasa. Tingkat kemakmuran dalam hal ini diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) masing-masing daerah. Berdasarkan hasil identifikasi PDRB ADHB per kapita, pemda dengan peringkat tertinggi cenderung lebih besar PDRB ADHB per kapitanya dibandingkan pemda dengan peringkat terendah. Sebagaimana pada tabel berikut.

| Tiga Pemkab dengan IKK Tertinggi | PDRB ADHB per kapita | Tiga Pemkab dengan IKK Terendah | PDRB ADHB per kapita |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                  |                      |                                 |                      |

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| Badung       | 66.974.173 | Flores Timur | 15.727.953 |
| Sabu Raijua  | 11.461.556 | Belu         | 14.881.177 |
| Sumba Tengah | 12.097.789 | Bangli       | 22.418.778 |
| Rata-rata    | 30.177.839 | Rata-rata    | 17.675.969 |

Sumber: BPS Provinsi Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015

Hal tersebut selaras dengan penelitian Namun, Hau (2003) dalam Ritonga (2014) yang menemukan hubungan negatif antara pendapatan masyarakat dengan belanja pemda, yaitu hubungan yang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat yang tinggi akan mengurangi permintaan untuk layanan sosial. Semakin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat maka semakin tinggi pendapatan pemda dari pajak dan retribusi yang dihasilkan (Nollenberger dkk., 2003). Dengan demikian, melalui tingkat kemakmuran masyarakat yang tinggi mengakibatkan kapasitas pemda dalam memasok barang dan jasa tambahan atau barang dan jasa yang lebih baik kepada masyarakat akan meningkat, sehingga pada akhirnya akan memperbaiki kondisi keuangan pemda.

### d. Karakteristik Profil Umur Masyarakat

Dari hasil identifikasi jumlah penduduk usia kerja dan bukan usia kerja pada tabel pemda dengan peringkat tertinggi cenderung memiliki rata-rata prosentasi penduduk usia kerja lebih banyak dibandingkan pemkab dengan peringkat terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dengan jumlah penduduk usia non-produktif lebih sedikit memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Semakin banyak jumlah penduduk usia kerja, semakin banyak pendapatan pemda yang akan diperoleh melalui penerimaan pajak dan retribusi. Sebaliknya, semakin banyak jumlah penduduk kelompok bukan usia kerja (anak-anak dibawah usia 15 tahun dan lansia di atas usia 59 tahun), semakin tinggi pengeluaran pemda seperti: layanan kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan, dan jaminan sosial bagi penduduk lansia. Hal tersebut akan akan memperburuk kondisi keuangan pemda. (Jin

dan Zhang, 2011 dalam Ritonga, 2014).  
Sebagaimana pada tabel berikut.

| Peringkat | Pekab        | Persentase Penduduk |                     |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|
|           |              | Angktn. Kerja       | Bukan Angktn. Kerja |
| Tertinggi | Badung       | 75,64               | 24,36               |
|           | Sabu Raijua  | 42,93               | 57,07               |
|           | Sumba Tengah | 38,74               | 61,26               |
|           | Rata-rata    | 52,44               | 47,56               |
| Terendah  | Flores Timur | 49,80               | 50,20               |
|           | Belu         | 45,10               | 54,90               |
|           | Bangli       | 62,03               | 37,97               |
|           | Rata-rata    | 52,31               | 47,69               |

Sumber: BPS Provinsi Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015

#### e. Karakteristik Efisiensi Keuangan

Efisiensi keuangan dalam hal ini diukur dari belanja pegawai per total belanja. Semakin besar belanja pegawai terhadap total belanja, semakin sedikit belanja untuk penyediaan produk dan layanan kepada masyarakat. Hal demikian akan memperburuk kondisi keuangan pemda, sebagaimana hasil identifikasi pada tabel berikut.

| Tiga Pemda dengan IKK Tertinggi | Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) | Tiga Pemda dengan IKK Terendah | Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Badung                          | 30,09   | Flores Timur                   | 48,59   |
| Sabu Raijua                     | 26,86   | Belu                           | 49,68   |
| Sumba Tengah                    | 24,94   | Bangli                         | 58,02   |
| Rata-rata                       | 27,30   | Rata-rata                      | 52,10   |

Sumber: LHP LKPD Pemkab di Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015

#### f. Karakteristik Barang dan Jasa

Dari sisi penawaran, biaya untuk memproduksi produk dan memberikan layanan, merupakan penentu dari penyediaan jasa dan produk oleh

pemda. Dalam memberikan layanan dan produk kepada masyarakat, pemda melibatkan pihak ketiga untuk mengerjakan proyek-proyeknya. Terhadap pihak ketiga tersebut, pemerintah membayar gaji/upah minimal sebesar upah minimum regional (UMR). Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik pemda, pemerintah kabupaten dengan nilai IKK tertinggi memiliki rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) lebih besar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dengan nilai IKK terendah, sebagaimana tabel berikut.

| Tiga Pemkab dengan IKK Tertinggi | UMR       | Tiga Pemkab dengan IKK Terendah | UMR       |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Badung                           | 1.905.000 | Flores Timur                    | 1.250.000 |
| Sabu Raijua                      | 1.250.000 | Belu                            | 1.250.000 |
| Sumba Tengah                     | 1.250.000 | Bangli                          | 1.622.000 |
| Rata-rata                        | 1.468.333 | Rata-rata                       | 1.374.000 |

Sumber: BPS Provinsi Bali, NTB, dan NTT

Upah tenaga kerja yang tinggi berpengaruh terhadap peningkatan kondisi keuangan pemerintah daerah. Peningkatan upah tenaga kerja dapat meningkatkan produktifitas kerja baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi dapat memperkecil harga produk yang dihasilkan. Jika harga produk yang dihasilkan lebih murah, maka alokasi anggaran untuk memperoleh produk tersebut semakin kecil. Situasi ini memperbaiki kondisi keuangan pemerintah daerah dari sisi pengeluaran.

Di sisi lain, harga produk yang semakin murah menyebabkan jumlah produk yang diminta semakin banyak, dengan asumsi bahwa alokasi anggaran untuk memperoleh produk tersebut adalah sama. Situasi ini memperbaiki kondisi keuangan pemerintah daerah dari sisi penyediaan layanan kepada masyarakat.

## SIMPULAN



Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan deskripsi kondisi keuangan dari tiga level pemda di Bali, NTB, dan NTT tahun 2011-2015, sebagai berikut.

## 1. Kondisi Keuangan Berdasarkan Hasil Pemingkatan dan Pengkategorian

### a. Level Pemda Provinsi

Berdasarkan hasil pemingkatan atas dasar nilai IKK, dalam kurun waktu tahun 2011-2015, tidak ada pemda provinsi yang konsisten memperoleh nilai tertinggi pada nilai IKK. Namun dari tahun 2011-2013, Pemprov Bali menduduki peringkat tertinggi secara berturut-turut. Tahun 2014 kondisi keuangan Pemprov Bali memburuk, tetapi kembali membaik pada tahun 2015. Sedangkan nilai IKK terendah selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2011-2013 yaitu Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan pengkategorian kondisi keuangan atas dasar nilai IKK pada tahun 2015, Pemprov Bali telah memperbaiki kondisi keuangannya dari kategori **Cukup** di tahun 2014 menjadi kategori **Baik** di tahun 2015. Sedangkan Pemrov NTB konsisten mencapai kategori **Cukup Sehat** selama tiga tahun ke belakang yaitu tahun 2013-2015 yang sebelumnya pada tahun 2012 memperoleh kategori **Buruk**. Beda halnya dengan Pemrov NTT mengalami penurunan kondisi, dari kategori **Baik** di tahun 2014 menjadi kategori **Cukup** di tahun 2015.

### b. Level Pemda Kota

Berdasarkan hasil pemingkatan atas dasar nilai IKK, nilai IKK tertinggi selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015 diperoleh Pemkot Denpasar. Sedangkan Pemkot Mataram belum bisa memperbaiki kondisi keuangan pemda selama lima tahun berturut-turut yaitu konsisten berada di posisi terendah.

Sedangkan berdasarkan hasil pengkategorian kondisi keuangan, Pemkot

Denpasar berkategori **Baik/sehat** ketika berada di tahun 2013-2014. Pada tahun 2015 turun predikatnya menjadi berkategori **Cukup**. Pemkot Kupang masih konsisten memperoleh predikat berkategori **Cukup** selama lima tahun berturut-turut, sedangkan Pemkot Mataram memperoleh kategori yang bervariasi. Tahun 2011 dan tahun 2013 berpredikat Cukup Sehat, akan tetapi pada tahun 2012, tahun 2014-2015 berkategori **Kurang Sehat**.

### c. Level Pemda Kabupaten

Berdasarkan hasil pemingkatan atas dasar nilai IKK, dalam kurun waktu tahun 2011-2015, pemda kabupaten yang konsisten memperoleh nilai tiga peringkat tertinggi pada nilai IKK yaitu Pemkab Badung, Pemkab Sabu Rajua, dan Pemkab Sumba Tengah. Sedangkan Pemkab Lombok Timur selalu konsisten di posisi terendah di antara pemkab yang lain selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2014. Pada tahun 2015 Pemkab Lombok Timur telah melakukan perbaikan. Hal ini terlihat dari hasil pemingkatan tiga pemkab terendah diduduki oleh Pemkab Flores Timur, Pemkab Belu, dan Pemkab Bangli.

## 2. Identifikasi Karakteristik yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Pemda

Berdasarkan tiga peringkat tertinggi dan tiga peringkat terendah untuk IKK pemda pada tahun 2015 dan mengkaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran produk maupun layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya, dapat disimpulkan beberapa karakteristik daerah yang mempengaruhi kondisi keuangan pemda, yaitu:

- a. pemerintah daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak cenderung mengalami kondisi keuangan yang lebih baik dari sisi penawaran dan sisi permintaan layanan yang disediakan oleh pemda;

- b. tingkat kemakmuran yang tinggi, persentase jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dari sisi permintaan barang jasa yang disediakan oleh pemda;
- c. kepadatan penduduk yang lebih tinggi, tingkat efisiensi keuangan yang tinggi, dan tingkat UMR yang tinggi cenderung mengalami kondisi keuangan yang lebih baik dari sisi penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemda.

## KETERBATASAN DAN SARAN

### 1. Keterbatasan

Berdasarkan analisis yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sekaligus sebagai saran bagi penelitian berikutnya sebagai berikut.

- a. Total daerah otonom di Indonesia terdiri dari 542 pemda yang terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (Ditjen Otda, 2014). Sedangkan penelitian di Bali, NTB, dan NTT ini hanya mencakup 8,12% dari total pemerintah daerah otonom yang ada di Indonesia. Oleh karena itu agar memperoleh hasil yang dapat diperbandingkan secara nasional, pengukuran perlu dilakukan secara menyeluruh di semua pemerintah daerah di Indonesia.
- b. Penggunaan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) hanya bisa digunakan dalam penghitungan rasio yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2011-2015. Sedangkan pada tahun 2015 terkait dengan Laporan Operasional (kebijakan akuntansi berbasis akrual), terdapat satu tambahan dimensi Solvabilitas Operasional. Oleh karena itu, penghitungan indeks kondisi keuangan (IKK) pemda tahun 2015 tidak bisa menggunakan pembobotan dimensi sebagaimana dalam model Ritonga (2014). Dalam hal ini semua bobot diasumsikan

- sama untuk masing-masing dimensi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut mengenai pembobotan dimensi yang disesuaikan dengan perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual.
- c. Pengkategorian yang digunakan dalam mengkategorikan kondisi keuangan pemerintah berdasarkan subyektivitas penulis, yaitu menggunakan mean dan standar deviasi. Oleh karena itu, disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain yang lebih sesuai.
- d. Validasi eksternal penelitian ini masih terbatas pada validasi *peer debriefing* yaitu dilakukannya verifikasi kertas kerja tahun 2015 oleh mahasiswa magister akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik khususnya dengan topik penelitian yang serupa. Sebaiknya validasi eksternal juga dilakukan melalui observasi lapangan ke pemerintah daerah sebagai obyek yang diteliti atas kondisi yang sebenarnya. Observasi lapangan tidak dilakukan karena keterbatasan waktu untuk melakukan validasi eksternal tersebut.

### 2. Saran

Saran untuk pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang rendah yaitu:

- 1. mengoptimalkan aset lancar untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi pengendapan kas yang terlalu besar;
- 2. mengontrol laju pertumbuhan penduduk, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas;
- 3. lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan inovasi penyediaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing daerah.

## Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil*

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2011.* Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011.* Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011.* Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011.* Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011.* Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011.* Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan*

- Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2011*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2011*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2012*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada*

- Tahun 2012. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba*
- Timur Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2012*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*



- Tahun 2013. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2013*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Barat Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2013*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2013*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan*

- Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2014*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2014. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2014*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2015*. Denpasar: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015*. Mataram: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan*



- Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2015*. Kupang: BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, 2016. Provinsi Bali dalam Angka 2016. Diakses pada 24 Juni 2017, [http://bali.bps.go.id/webbeta/website/pdf\\_publicasi/Provinsi%20Bali%20Dalam%20Angka%202016.pdf](http://bali.bps.go.id/webbeta/website/pdf_publicasi/Provinsi%20Bali%20Dalam%20Angka%202016.pdf)
- Badan Pusat Statistik, 2016. Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2016. Diakses pada 24 Juni 2017, [http://ntb.bps.go.id/webs/pdf\\_publicasi/Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf](http://ntb.bps.go.id/webs/pdf_publicasi/Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf)
- Badan Pusat Statistik, 2016. Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2016. Diakses pada 17 April 2017, [http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf\\_publicasi/Provinsi-Nusa-Tenggara-Timur-Dalam-Angka-2016.pdf](http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publicasi/Provinsi-Nusa-Tenggara-Timur-Dalam-Angka-2016.pdf)
- Badan Pusat Statistik, 2016. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015 Pulau Jawa dan Bali Buku 2. Diakses pada 17 Mei 2017, [https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Tinjauan-Regional-Berdasarkan-PDRB-Kabupaten-Kota-2011-2015--Buku-2-Pulau-Jawa-Bali.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Tinjauan-Regional-Berdasarkan-PDRB-Kabupaten-Kota-2011-2015--Buku-2-Pulau-Jawa-Bali.pdf)
- Badan Pusat Statistik, 2016. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015 Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Buku 5. Diakses pada 17 Mei 2017, [https://www.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Tinjauan-Regional-Berdasarkan-PDRB-Kabupaten-Kota-2011-2015--Buku-5-Pulau-Nusa-Tenggara--Maluku--dan-Papua.pdf](https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Tinjauan-Regional-Berdasarkan-PDRB-Kabupaten-Kota-2011-2015--Buku-5-Pulau-Nusa-Tenggara--Maluku--dan-Papua.pdf)

- Baidori. 2015. *Pengklastran Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali Berdasarkan Variabel Sosio ekonomi (Komparasi Laporan keuangan Daerah)*. Thesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bere, S.M. 2017. Merasa Tak Diperhatikan, Ratusan Warga NTT Ingin Pindah ke Timor Leste. Diakses pada 15 April 2017, <http://regional.kompas.com/read/2017/01/13/20493191/merasa.tak.diperhatikan.ratusan.warga.ntt.ingin.pindah.ke.timor.leste>
- Brown, KW 1993, "The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Essay-Use Assessment Tool for Smaller Cities." *Government Finance Review*, Vol 9, no 6, pp 21-26.
- Carmeli, A. 2008. "The Fiscal Distress of Local Governments in Israel: Sources and Coping Strategies." *Administration & Society*, Vol 39, No 8, pp 984- 1007.
- Creswell, John. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Putaka Pelajar.
- DJPK. 2012. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ditjen Otda. 2014. *Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Dethan, Stevany H. 2015. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009-2013*. GaneC Swara Vol 9, No 2, September 2015.
- Dewi, Anisa D. 2016. *Analisis Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown*. Skripsi. Yogyakarta: FEB UGM.
- Halim. Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendrick, R. 2004. "Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Suburban Municipalities." *Urban Affairs Review*, Vol 40, No 1, pp 78-114.
- Hennink M, Hutter Inge, Bailey Ajay. 2011. *Qualitative Research Methods*. India: Sage Publications, Inc.
- Jones, S & Walker, R 2007, "Explanators of local government distress", *Abacus*, vol 43, no 3, pp 396-418.
- Kamnikar, JA, Kamnikar, E & Deal, KH 2006, "Assesing a state's financial condition", *Journal of Government Financial Management*, vol 55, no 3, pp 30-36.
- Kloha, P., Weissert, C.S., Kleine, R. 2005. "Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress" *Public Administration Review*, Vol 65, No 3, pp 313-323.
- Kusnadi, F.H. 2016. *Pengembangan Model The Financial Trends Monitoring System Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Maher, C.S. dan Nollenberger, K. 2009. Revisiting Kenneth Brown's "10-Point Test" *Government Finance Review*, Vol 25, No 5, pp 61-66.
- Nollenberger, K., Groves, M.S., Valente, M.G. 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*. International City/County Management Association. Washington, DC.
- Natrini, Nur Dewi. 2016. *Desain dan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali Tahun 2013 dan 2014*. Tesis. Yogyakarta: FEB UGM.
- NTT, BPS. 2016. Profil Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil SUPAS 2015. Diakses pada 17 April 2017, [http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf\\_publi](http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publi)

- kasi/Profil-Penduduk-Nusa-Tenggara-Timur-Hasil-SUPAS-2015.pdf
- Ohls, J.C. dan T.J. Wales. 1972. "Supply and demand for state and local services. *The Review of Economics and Statistics*, Vol 54, No 4, pp 424-430.
- Priyambodo, V.K., 2014. *Pengklasteran Pemerintah Daerah Untuk Memaksimalkan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Priyono dan Z. Ismail. 2016. *Teori Ekonomi*. Cetakan II. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 224. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ritonga, I.T., C. Clark, dan G. Wickremashinghe. 2012. Developing a Measure of Local Government Financial Condition. *The 13th International Annual Conference Asian Academic Accounting Association*. Kyoto, Japan, 9-12 November 2012.
- Ritonga, I.T., C. Clark, dan G. Wickremashinghe, 2012b. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration." *Municipal and Public Finance*, Vol. 1, Issue 2.
- Ritonga, I.T. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritonga, I.T. 2017. *Akuntansi Keuangan Pemda Pengantar*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S. 2010. "Conceptualizing Financial Condition in Local Government" *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol 22, No 2, pp 149-177.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Rofer. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Soewadji, Yusuf. 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Wang, X, Dennis, L & Tu, YSJ 2007. "Measuring financial condition: A Study of US states" *Public Budgeting Finance*, Vol 27, No 2, pp 1-21.
- Zafra-Gómez, J.L., A.M. López-Hernández, dan A. Hernández-Bastida. 2009. "Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government." *The American Review of Public Administration*, Vol 39, No 4, pp 425-449.
- \_\_\_\_\_. 2015. Menunggu Layanan RSUD Baru. Diakses pada 15 April 2017, <http://mediakom.sehatnegeriku.com/menunggu-layanan-rsud-baru/>